

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Logistik Mabes Polri adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik di lingkungan POLRI, dan berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Dalam melaksanakan tugas, Logistik Mabes POLRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi POLRI, pelayanan administrasi personel, pembinaan perawatan personel, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan urusan tata usaha di lingkungan Logistik Mabes POLRI.
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran sarana dan prasarana (Sarpras) POLRI, pengkajian, perumusan, pengembangan sistem dan metode, standardisasi sarana dan prasarana (Sarpras) POLRI, penyelenggaraan informasi sarana dan prasarana (Sarpras) POLRI, serta kerjasama pengadaan luar negeri.
- c. penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana (Sarpras) materiil bekal umum (Bekum).
- d. penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana (Sarpras) materiil peralatan (Pal).

- e. pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan.
- f. penyelenggaraan manajemen pergudangan serta pelaksanaan *stock opname* materiil persediaan.
- g. penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Ssarpras Polri dan pengkoordinasian dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN).
- h. penyelenggaraan tata usaha dan urusan dalam di lingkungan Logistik Mabes POLRI.

Berdasarkan fungsi pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan, maka dibentuklah Biro Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) Logistik Mabes POLRI sebagai sebuah Biro yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Kapolri Bidang Logistik (Aslog Kapolri), Biro Faskon Logistik Mabes POLRI bertugas menyelenggarakan dan membina teknis Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) untuk pengadaan, pengawasan dan pengendalian, penginventarisasian di lingkungan POLRI serta urusan tata usaha di lingkungan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes POLRI. Biro Fasilitas dan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang sejak awal tahun 2020 dipimpin oleh BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. BERTY D.K. SINAGA.

4.1.1. Visi, Misi dan Kebijakan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik

Mabes Polri

a. Visi Biro Faskon Logistik Mabes POLRI

Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengadaan pembangunan konstruksi sehingga terwujud, terdukung sarana dan prasarana POLRI yang berkualitas.

b. Misi Biro Faskon Logistik Mabes POLRI

- 1) meningkatkan mutu program Logistik Mabes POLRI yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- 2) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa POLRI secara e-proc melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) POLRI sehingga terhindar dari komplain masyarakat atas dugaan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Kebijakan Biro Faskon Logistik Mabes POLRI

Melaksanakan arahan Aslog Kapolri dan mendukung tugas Logistik Mabes Polri dibidang Fasilitas dan Konstruksi pengadaan, pengawasan dan penginventarisasian.

4.1.2. Hasil penyebaran kuesioner

Secara keseluruhan total kuesioner yang didistribusikan kepada 50 responden, dan dari jumlah tersebut total reponden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 50 responden. Kuesioner dari 2 responden tidak dapat diolah, Berdasarkan hal tersebut, maka total kuesioner yang berasal dari responden dan dapat diolah sebanyak 48 dan dianalisis lebih lanjut untuk penelitian ini adalah sebanyak 48 kuesioner.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Budgetary Slack

Tabel 4.2.1.
Tabel Bias Anggaran

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
<i>Budgetary Slack</i>					
Bias Anggaran	Pembuatan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran	27,1%	72.9%		
	Batas akhir penarikan anggaran pada akhir tahun anggaran	24,5%	75.5%		
	Kebijakan pelaporan persentase kemajuan fisik proyek konstruksi pada akhir tahun anggaran	26,5%	69.4%		
	Kebijakan penyelesaian proyek konstruksi sampai dengan batas akhir tahun anggaran	24,5%	75.5%		
	Kebijakan pembuatan jaminan penyelesaian pekerjaan sampai dengan batas akhir kontrak	26,5%	71.4%	2%	

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden mengenai bias anggaran yang terjadi dalam Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri dapat

disimpulkan bahwa indikator pembuatan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran diperoleh nilai sangat setuju sebesar 27,1% responden dan nilai setuju sebesar 72,9% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 72,9% responden. Indikator Batas akhir penarikan anggaran pada akhir tahun anggaran diperoleh nilai sangat setuju sebesar 24,5% responden dan nilai setuju sebesar 75,5% responden. Indikator Kebijakan pelaporan persentase kemajuan fisik proyek konstruksi pada akhir tahun anggaran diperoleh nilai sangat setuju sebesar 26,5% responden dan nilai setuju sebesar 69,4% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 69,4% responden. Indikator Kebijakan penyelesaian proyek konstruksi sampai dengan batas akhir tahun anggaran diperoleh nilai sangat setuju sebesar 24,5% responden dan nilai setuju sebesar 75,5% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 75,5% responden. Indikator Kebijakan pembuatan jaminan penyelesaian pekerjaan diperoleh nilai sangat setuju sebesar 26,5% responden dan nilai setuju sebesar 71,4% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 71,4% responden maka dapat disimpulkan bahwa Kesenjangan Anggaran (*Budgetary Slack*) yang mungkin terjadi dalam tahun anggaran tersebut dapat diantisipasi dengan mengikuti langkah-langkah akhir tahun yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dalam hal pembuatan pertanggungjawaban keuangan, kebijakan-kebijakan yang harus diambil Pejabat Pembuat Komitmen pada akhir tahun anggaran sehingga proyek pembangunan fasilitas dan konstruksi dapat selesai walaupun sudah habis masa kontrak dan penyedia barang/jasa dapat bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek pembangunan fasilitas dan konstruksi pada tahun

anggaran tersebut dengan pembuatan jaminan penyelesaian pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019.

4.2.2. Komitmen organisasi

4.2.2.1. Loyalitas

Tabel 4.2.2.1.
Tabel Loyalitas

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
Komitmen organisasi					
Loyalitas					
	Sumpah Catur prasetya bagi anggota Polri	40%	40%	20%	
	Penandatanganan Pakta Integritas bagi anggota Polri dan PNS Polri	40%	60%		
	Sumpah Panca prasetya KORPRI bagi PNS Polri	36%	46%	18%	
	Promosi jabatan bagi anggota Polri dan PNS Polri	30%	68%	2%	
	Penilaian kinerja tiap semester bagi anggota Polri dan PNS Polri	28%	68%	4%	

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa dimensi komitmen organisasi yang pertama dinilai adalah loyalitas dengan indikator pengucapan catur prasetya bagi anggota Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 40% responden dan nilai setuju sebesar 40% responden, nilai tidak setuju sebesar 20% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 40% responden. Indikator

penandatanganan Pakta Integritas bagi anggota Polri dan PNS berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 40% responden dan nilai setuju sebesar 60% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 60% responden. Indikator pengucapan Sumpah Panca Prasetya Korpri bagi PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 36% responden dan nilai setuju sebesar 46% responden, nilai tidak setuju sebesar 18% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 46% responden. Indikator promosi jabatan berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 30% responden dan nilai setuju sebesar 68% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 68% responden. Indikator promosi jabatan berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 30% responden dan nilai setuju sebesar 68% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 68% responden. Indikator penilaian kinerja tiap semester bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 28% responden dan nilai setuju sebesar 68% responden, nilai tidak setuju sebesar 4% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 68% responden. Berdasarkan persentase jawaban kuesioner dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa responden menjawab tidak setuju dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki serta promosi jabatan yang diberikan pimpinan hanya diprioritaskan bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan yang mahir dalam suatu bidang pekerjaan serta hubungan tata cara

kerja yang baik baik secara vertikal dan horizontal dalam lingkup dunia kerja.

4.2.2.2. Pertelaan tugas

Tabel 4.2.2.2.
Tabel Pertelaan Tugas

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
Komitmen organisasi					
Pertelaan tugas	Pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Umum Polri terhadap pertelaan tugas	28%	72%		
	Penilaian Analisis Beban Kerja	26%	74%		
	Penerapan pertelaan tugas pada Sub Bagian dan Bagian	28%	68%	4%	
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan komitmen organisasi	30%	70%		

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa dimensi komitmen organisasi yang selanjutnya dinilai adalah pertelaan tugas dengan indikator pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Umum Polri terhadap pertelaan tugas berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 28% responden dan nilai setuju sebesar 72% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 72% responden. Indikator penilaian Analisis Beban Kerja bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 26% responden dan nilai setuju sebesar 74% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 74% responden. Indikator penerapan pertelaan tugas pada sub Bagian dan Bagian bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai

sangat setuju sebesar 28% responden dan nilai setuju sebesar 68% responden, nilai tidak setuju sebesar 4% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 68% responden. Indikator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tiap akhir tahun berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 30% responden dan nilai setuju sebesar 70% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 70% responden. Berdasarkan persentase jawaban kuesioner dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dari anggota Polri dan PNS Polri pada Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri dapat dilihat dari penilaian Analisis Beban Kerja dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun, kedua jenis laporan memuat tentang kinerja para anggota Polri dan PNS Polri guna mewujudkan komitmen organisasi kerja berbasis anggaran, sehingga dapat dilihat dari kedua jenis laporan tersebut apabila beban kerjanya tinggi maka kinerja keuangan yang dicapai akan tinggi pula.

4.2.3. Kompensasi

4.2.3.1. Kompensasi Finansial

Tabel 4.2.3.1.
Tabel Kompensasi Finansial

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
Kompensasi					
Kompensasi Finansial	Pemberian tunjangan kinerja	42%	54%	4%	
	Pemberian honor kelompok kerja	38%	56%	6%	
	Pemberian uang makan bagi PNS Polri dan uang laukpauk bagi anggota Polri	36%	62%	2%	
	Pemberian tunjangan hari raya	38%	36%	28%	
	Pemberian uang lembur bagi PNS Polri	36%	62%	2%	

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa dimensi kompensasi yang pertama dinilai adalah kompensasi finansial dengan indikator pemberian tunjangan kinerja anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 42% responden dan nilai setuju sebesar 54% responden, nilai tidak setuju sebesar 4% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 54% responden. Indikator pemberian honor kelompok kerja anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 38% responden dan nilai setuju sebesar 56% responden, nilai tidak setuju sebesar 6% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 56% responden. Indikator pemberian uang makan bagi PNS Polri dan uang lauk

pauk bagi anggota Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 36% responden dan nilai setuju sebesar 62% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 62% responden. Indikator pemberian tunjangan hari raya bagi PNS Polri dan anggota Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 38% responden dan nilai setuju sebesar 36% responden, nilai tidak setuju sebesar 28% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 36% responden. Indikator pemberian uang lembur bagi PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 36% responden dan nilai setuju sebesar 62% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 62% responden. Kompensasi finansial yang seharusnya mutlak mempengaruhi kinerja keuangan, namun hasil kuesioner dari responden menyatakan bahwa kompensasi finansial tidak mutlak mempengaruhi kinerja keuangan. Kompensasi finansial yang diberikan oleh Biro Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) Logistik Mabes Polri mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Polri, dimana peraturan ini mengatur tentang besaran pemberian tunjangan kinerja kepada anggota Polri dan PNS Polri sesuai dengan golongan ruang kepangkatan, dan jabatan. Tunjangan Kinerja yang diberikan merupakan salah satu alat untuk menstimulasi anggota Polri dan PNS Polri pada Biro Fasilitas dan Konstruksi guna meningkatkan kinerja kerja mereka yang akan berdampak secara signifikan pada peningkatan kinerja keuangan organisasi, namun hal tersebut tidak mutlak terjadi karena tunjangan kinerja dipengaruhi oleh

kehadiran anggota Polri dan PNS Polri di tempat kerja dan kinerja yang dihasilkan dalam satu hari oleh anggota Polri dan PNS Polri. Pemberian honor kelompok kerja berdasarkan Surat Perintah Kepantiaan dan sertifikasi pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

4.2.3.2. Kompensasi Non Finansial

Tabel 4.2.3.2.

Tabel Kompensasi Non Finansial

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
Kompensasi					
Kompensasi Non Finansial	Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat atau golongan	40%	60%		
	Pemberian beasiswa pendidikan umum	36%	62%	2%	
	Pemberian beasiswa pendidikan kedinasan	32%	66%	2%	
	Pemberian rumah dinas sebagai sarana tempat tinggal bagi anggota Polri dan PNS Polri	32,7%	65,3%	2%	
	Pemberian Fasilitas Kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri	38,8%	59,2%	2%	

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa dimensi kompensasi yang dinilai selanjutnya adalah kompensasi non finansial dengan indikator pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat atau golongan bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 40% responden dan nilai setuju sebesar 60% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 60% responden. Indikator pemberian beasiswa pendidikan umum bagi anggota

Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 36% responden dan nilai setuju sebesar 62% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 62% responden. Indikator pemberian beasiswa pendidikan kedinasan bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 32% responden dan nilai setuju sebesar 66% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 66% responden. Indikator pemberian rumah dinas sebagai sarana tempat tinggal bagi anggota Polri dan PNS Polri bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 32,7% responden dan nilai setuju sebesar 65,3% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 65,3% responden. Indikator pemberian fasilitas kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 38,8% responden dan nilai setuju sebesar 59,2% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 59,2% responden. Kompensasi non finansial yang seharusnya mutlak mempengaruhi kinerja keuangan, namun hasil kuesioner dari responden menyatakan bahwa kompensasi non finansial tidak mutlak mempengaruhi kinerja keuangan. Kompensasi non finansial yang diberikan oleh Biro Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) Logistik Mabes Polri dirasakan masih kurang oleh anggota Polri dan PNS Polri dikarenakan masih sedikitnya pemberian beasiswa pendidikan umum dan pendidikan kedinasan bagi anggota Polri dan PNS Polri pada Biro Fasilitas

dan Konstruksi (Faskon) Logistik Mabes Polri yang memiliki kompetensi tinggi.

4.2.4. *Human Capital*

4.2.4.1. Pendidikan kejuruan dan pelatihan

Tabel 4.2.4.1.

Tabel pendidikan kejuruan dan pelatihan

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
<i>Human Capital</i>					
Pendidikan kejuruan dan pelatihan	Adanya pelatihan peralatan sistem informasi dan komunikasi monitoring center	27,1%	72,9%		
	Adanya pelatihan administrasi keuangan	24,5%	75,5%		
	Adanya pelatihan pengadaan barang dan jasa	26,5%	69,4%		
	Adanya pelatihan perencanaan anggaran	24,5%	75,5%		
	Adanya pelatihan manajemen logistik dan penatausahaan Barang Milik Negara	26,5%	71,4%	2%	

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa *Human capital* secara mutlak mempengaruhi kinerja keuangan, sesuai hasil kuesioner dari responden, indikator pelatihan peralatan sistem informasi dan komunikasi monitoring center berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 27,1% responden dan nilai setuju sebesar 72,9% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar

72,9% responden. Indikator pelatihan administrasi keuangan berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 24,5% responden, nilai setuju sebesar 75,5% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 75,5% responden. Indikator pelatihan barang dan jasa berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 26,5% responden, dan nilai setuju sebesar 69,4% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 69,4% responden. Indikator pelatihan perencanaan anggaran berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 24,5% responden, dan nilai setuju sebesar 75,5% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 75,5% responden. Indikator pelatihan manajemen logistik dan penatausahaan Barang Milik Negara berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 26,5% responden, dan nilai setuju sebesar 71,4% responden, nilai tidak setuju sebesar 2% dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 71,4% responden. *Human capital* dalam penelitian ini adalah pelatihan yang diberikan kepada anggota POLRI dan PNS POLRI guna meningkatkan kinerja kerja mereka yang akan berdampak secara signifikan pada peningkatan kinerja keuangan organisasi. Rencana Kegiatan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada anggota POLRI dan PNS POLRI. Adapun jenis pelatihan pelatihan yang diberikan kepada anggota POLRI dan PNS POLRI seperti pelatihan peralatan sistem informasi dan komunikasi monitoring center, pelatihan manajemen logistik dan penatausahaan Barang Milik Negara, pelatihan perencanaan anggaran, pelatihan administrasi

keuangan, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Dan untuk responden sebagian kecil yang menjawab tidak setuju hanya untuk pelatihan administrasi keuangan dikarenakan responden tersebut tidak menduduki jabatan administrasi keuangan.

4.2.5. Governance

4.2.5.1. International Federation of Accountants (IFAC) tentang International Framework: Good Governance in the Public Sector

Tabel 4.2.5.1.

Tabel International Federation of Accountants (IFAC) tentang International Framework: Good Governance in the public sector

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
<i>Governance</i>					
International Federation of Accountants (IFAC) tentang International Framework: Good Governance in the public sector	Penerapan prinsip akuntabilitas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	32,7%	67,3%		
	Penerapan prinsip transparansi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	32,7%	67,3%		
	Penerapan prinsip fairness dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	24,5%	73,5%	2%	

Variabel/Dimensi	Indikator	NILAI			
		SS	S	TS	STS
	Penerapan prinsip independensi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	16,3%	83,7%		
	Penerapan prinsip responsibility dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	14,6%	85,4%		
	Penerapan prinsip efektif dan efisien dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	25%	70,8%	4,2%	
	Penerapan prinsip intervensi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	14,3%	55,1%	26,5%	4,1%

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa *Governance* mempengaruhi kinerja keuangan, sesuai hasil kuesioner dari responden, indikator prinsip akuntabilitas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 32,7% responden dan nilai setuju sebesar 67,3% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 67,3% responden. Indikator prinsip transparansi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 32,7% responden dan nilai setuju sebesar 67,3%, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 67,3% responden. Indikator prinsip fairness dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 24,5%

responden, nilai setuju sebesar 73,5%, dan nilai tidak setuju sebesar 2% responden. Indikator prinsip independensi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 16,3% responden dan nilai setuju sebesar 83,7% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 83,7% responden. Indikator prinsip responsibility dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 14,6% responden dan nilai setuju sebesar 85,4% responden, dan nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 85,4% responden. Indikator prinsip efektif dan efisien dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 25% responden, nilai setuju sebesar 70,8% responden, dan nilai tidak setuju sebesar 4,2%, nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 70,8% responden. Indikator prinsip intervensi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh nilai sangat setuju sebesar 14,3% responden, nilai setuju sebesar 55,1% responden, nilai tidak setuju sebesar 26,5%, dan nilai sangat tidak setuju sebesar 4,1%, nilai setuju merupakan nilai tertinggi sebesar 55,1% responden. *Governance* yang seharusnya mutlak mempengaruhi kinerja keuangan, namun hasil kuesioner dari responden menyatakan bahwa *governance* tidak mutlak mempengaruhi kinerja keuangan, pengertian *governance* dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *good governance* pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seperti penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, *fairness*, *responsibility*, intervensi, efektif dan efisien yang akan berdampak pada peningkatan kinerja

keuangan organisasi. International Federation of Accountants (IFAC) tentang International Framework: Good Governance in the Public Sector Tahun 2014 merupakan dasar penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Biro Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) yang akan berdampak secara signifikan pada peningkatan kinerja keuangan organisasi. Persentase jawaban responden ada sekitar 30% yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dikarenakan adanya intervensi dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembuatan laporan realisasi anggaran.

4.2.6. Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri

4.2.6.1. Rencana Kegiatan Biro Fasilitas dan Konstruksi tahun 2019

Tabel 4.2.6.1.

Tabel Rencana Kegiatan Biro Fasilitas dan Konstruksi tahun 2019

Variabel/ Dimensi	Indikator	NILAI				SKOR
		SS	S	TS	STS	
Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri						
Kinerja keuangan Bagian Pengadaan	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah menyusun standarisasi Fasilitas dan Konstruksi	30%	50%	10%	10%	

	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah mengendalikan, mengawasi dan pembinaan Pengembangan Fasilitas Konstruksi serta pengadaan Barang/Jasa	32%	36%	28%	4%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan	28%	40%	24%	8%	

	<p>Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta membuat analisis evaluasi proyek hasil pelelangan</p>	30%	50%	10%	10%	
	<p>Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah memeriksa dan meneliti serta menguji materiil faskon yang diadakan</p>	42%	28%	22%	8%	

	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	34%	40%	18%	8%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap mutu barang	26%	68%	2%	4%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah menyusun	28%	64%	6%	2%	

	dokumen pemilihan penyedia barang					
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengadaan salah satunya adalah menyelenggarakan pelaksanaan penyedia barang	26,5%	71,4%	0%	2%	
Variabel/ Dimensi	Indikator	NILAI				SKOR
		SS	S	TS	STS	
Kinerja keuangan Bagian Pengawasan Pembangunan	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah penganalisaan dan pengevaluasian kondisi bangunan Polri	30%	66%	2%	2%	

	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah mengendalikan dan membina fungsi pengawasan	34%	50%	8%	8%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah pelaksanaan supervisi terhadap satker Mabes Polri dan Kewilayahan	30%	42%	20%	8%	

	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah menyusun rencana pengawasan dan pengendalian bangunan satker Mabes Polri dan Kewilayahan	28%	44%	24%	4%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah menyajikan data hasil pengawasan dan pengendalian	40%	30%	20%	10%	

	<p>Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah melaksanakan supervisi pengawasan dan pengendalian bangunan Polri baik tingkat Mabas maupun Kewilayahan</p>	36%	40%	16%	8%	
	<p>Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bangunan Polri baik tingkat Mabas maupun kewilayahan</p>	22%	68%	4%	6%	

	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah membuat laporan kondisi bangunan Polri	24%	74%	0%	2%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian Pengawasan Bangunan salah satunya adalah memberikan asistensi terhadap satker Mabas Polri dan kewilayahan	28%	68%	2%	2%	
Variabel/ Dimensi	Indikator	NILAI				SKOR
		SS	S	TS	STS	

Kinerja keuangan Bagian Inventarisasi	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah terlaksananya data inventarisasi berupa tanah dan bangunan diseluruh satker Mabes maupun kewilayahan secara kongkrit, jelas dan lengkap	28%	68%	2%	2%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data Faskon tingkat Mabes dan Kewilayahan	36%	60%	0%	4%	

	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah melaksanakan inventarisasi terhadap aset Polri baik tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat	28%	54%	10%	8%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian membantu satker tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan dalam mengurus sertifikat tanah dan bangunan	32%	42%	18%	8%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian menyusun	28%	44%	24%	4%	

	katalogisasi Faskon baik tingkat Mabes dan Kewilayahan					
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Faskon baik Satker Mabes maupun Kewilayahan	42%	30%	22%	6%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah menerima dan menghimpun usulan penghapusan	34%	40%	16%	10%	

	tanah dan bangunan serta memproses administrasinya					
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah meneliti administrasi dan menilai usulan penghapusan dan bangunan dari satker mabas dan kewilayahan	34%	40%	18%	8%	
	Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada Bagian inventarisasi salah satunya adalah melaksanakan	28%	36%	22%	14%	

	proses administrasi usulan penghapusan tanah dan bangunan					
--	---	--	--	--	--	--

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri mendapatkan nilai mutlak, kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bagian pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang program kinerja keuangan pada bagian pengadaan adalah menyusun standarisasi fasilitas dan konstruksi dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30%, responden yang menjawab setuju sebesar 50%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 10%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 10%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang kedua adalah mengendalikan, mengawasi, dan membina pengembangan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan barang dan jasa dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 32%, responden yang menjawab setuju sebesar 36%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 28%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 4%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan

dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 40%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 24%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang keempat adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta membuat analisis evaluasi proyek hasil pelelangan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 42%, responden yang menjawab setuju sebesar 28%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 22%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang kelima adalah melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 34%, responden yang menjawab setuju sebesar 40%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 18%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang keenam adalah melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap mutu barang dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 26%, responden yang menjawab setuju sebesar 68%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 4%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang ketujuh adalah menyusun dokumen pemilihan penyedia barang dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 64%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 6%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%. Program kinerja keuangan pada bagian pengadaan yang kedelapan adalah menyelenggarakan pelaksanaan penyedia barang dengan

persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 26,5%, responden yang menjawab setuju sebesar 71,4%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang pertama adalah penganalisaan dan pengevaluasian kondisi bangunan Polri dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30%, responden yang menjawab setuju sebesar 66%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang kedua adalah mengendalikan dan membina fungsi pengawasan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 34%, responden yang menjawab setuju sebesar 50%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 8%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang ketiga adalah pelaksanaan supervisi terhadap Satker Mabes Polri dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30%, responden yang menjawab setuju sebesar 42%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 20%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang keempat adalah menyusun rencana pengawasan dan pengendalian Satker Mabes Polri dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 44%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 24%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 4%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang kelima adalah menyajikan

data hasil pengawasan dan pengendalian dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 40%, responden yang menjawab setuju sebesar 30%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 20%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 10%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang keenam adalah melaksanakan supervisi pengawasan dan pengendalian bangunan Polri baik tingkat Mabes maupun kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 36%, responden yang menjawab setuju sebesar 40%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 16%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang ketujuh adalah melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bangunan Polri baik tingkat Mabes dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 22%, responden yang menjawab setuju sebesar 68%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 4%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 6%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang kedelapan adalah membuat laporan kondisi bangunan Polri dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 24%, responden yang menjawab setuju sebesar 74%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%. Program kinerja keuangan pada bagian pengawasan pembangunan yang kesembilan adalah memberikan asistensi terhadap Satker Mabes Polri dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 68%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2%, dan responden yang menjawab sangat

tidak setuju sebesar 2%. Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang pertama adalah terlaksananya data inventarisasi berupa tanah dan bangunan diseluruh Satker Mabes maupun kewilayahan secara kongkrit, jelas dan lengkap dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 14%, responden yang menjawab setuju sebesar 68%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%.

Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang pertama adalah terlaksananya data inventarisasi berupa tanah dan bangunan diseluruh Satker Mabes maupun kewilayahan secara kongkrit, jelas dan lengkap dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 14%, responden yang menjawab setuju sebesar 68%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 2%.

Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang kedua adalah melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data Faskon tingkat Mabes dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 36%, responden yang menjawab setuju sebesar 60%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 4%.

Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang ketiga adalah melaksanakan inventarisasi terhadap aset Polri baik tanah maupun bangunan yang belum bersertifikat dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 54%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 10%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 18%.

Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang keempat adalah membantu Satker Mabes Polri dan

kewilayahan dalam pengurusan sertifikat dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 32%, responden yang menjawab setuju sebesar 42%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 18%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang kelima adalah menyusun katalogisasi Fasilitas dan Konstruksi baik tingkat Mabes Polri dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 44%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 24%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 4%. Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang keenam adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas dan Konstruksi baik di Satker Mabes dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 42%, responden yang menjawab setuju sebesar 30%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 22%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 6%. Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang ketujuh adalah menerima dan menghimpun usulan penghapusan tanah dan bangunan serta memproses administrasinya dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 34%, responden yang menjawab setuju sebesar 40%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 16%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 10%. Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang kedelapan adalah meneliti administrasi dan menilai usulan penghapusan tanah dan bangunan dari Satker Mabes dan kewilayahan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 34%, responden yang menjawab setuju sebesar 40%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 18%, dan responden yang

menjawab sangat tidak setuju sebesar 8%. Program kinerja keuangan pada bagian inventarisasi yang kesembilan adalah melaksanakan proses administrasi usulan penghapusan tanah dan bangunan dengan persentase responden yang menjawab sangat setuju sebesar 28%, responden yang menjawab setuju sebesar 36%, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 22%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 14%.

4.3. Uji Validitas

Saifulloh (2019) menyatakan bahwa uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur, dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat dan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Cara pengujian validitas instrumen dengan melakukan analisis korelasi. Perhitungan uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment dengan mengkorelasikan skor item butir dengan total skor pertanyaan, uji validitas ini menggunakan bantuan SPSS 25.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu, membandingkan Nilai r hitung dengan Nilai r tabel, jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid, jika nilai r hitung $<$ r tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Membandingkan Nilai Sig. (2-tailed) dengan Probabilitas 0,05, jika nilai Sig. (2-tailed) $<$ 0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid, jika nilai Sig. (2-tailed) $<$ 0,05 dan Pearson Correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid, jika nilai Sig. (2-tailed) $>$

0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Adapun hasil pengujian validitas dapat dinyatakan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3.
Tabel Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Sig	Kriteria	
Budgetary Slack (X1)	BS-1	0,696	0,279	0,000	Valid	
	BS-2	0,854	0,279	0,000	Valid	
	BS-3	0,769	0,279	0,000	Valid	
	BS-4	0,678	0,279	0,000	Valid	
	BS-5	0,669	0,279	0,000	Valid	
Komitmen Organisasi (X2)	KO-1	0,616	0,279	0,000	Valid	
	KO-2	0,331	0,279	0,019	Valid	
Komitmen Organisasi (X2)	KO-3	0,524	0,279	0,000	Valid	
	KO-4	0,329	0,279	0,020	Valid	
	KO-5	0,403	0,279	0,004	Valid	
	KO-6	0,450	0,279	0,001	Valid	
	KO-7	0,602	0,279	0,000	Valid	
	KO-8	0,421	0,279	0,002	Valid	
	KO-9	0,557	0,279	0,000	Valid	
	Kompensasi (X3)	K-1	0,482	0,279	0,000	Valid
		K-2	0,171	0,279	0,235	Tdk Valid
K-3		0,390	0,279	0,005	Valid	
K-4		0,433	0,279	0,002	Valid	
K-5		0,365	0,279	0,009	Valid	
K-6		0,457	0,279	0,001	Valid	
K-7		0,399	0,279	0,004	Valid	
K-8		0,383	0,279	0,006	Valid	
K-9		0,341	0,279	0,015	Valid	
K-10		0,331	0,279	0,019	Valid	
Human Capital (X4)	HC-1	0,696	0,279	0,000	Valid	
	HC-2	0,854	0,279	0,000	Valid	
	HC-3	0,769	0,279	0,000	Valid	
	HC-4	0,678	0,279	0,000	Valid	
	HC-5	0,669	0,279	0,000	Valid	
Governance (X5)	G-1	0,542	0,279	0,000	Valid	

Kinerja Keuangan Polri (Y)	G-2	0,694	0,279	0,000	Valid
	G-3	0,564	0,279	0,000	Valid
	G-4	0,780	0,279	0,000	Valid
	G-5	0,542	0,279	0,000	Valid
	G-6	0,600	0,279	0,000	Valid
	G-7	0,530	0,279	0,000	Valid
	KKP-1	0,477	0,279	0,000	Valid
	KKP-2	0,336	0,279	0,017	Valid
	KKP-3	0,585	0,279	0,000	Valid
	KKP-4	0,667	0,279	0,000	Valid
	KKP-5	0,678	0,279	0,000	Valid
	KKP-6	0,336	0,279	0,017	Valid
	KKP-7	0,402	0,279	0,004	Valid
	KKP-8	0,395	0,279	0,000	Valid
	KKP-9	0,279	0,279	0,005	Valid
	KKP-10	0,304	0,279	0,032	Valid
	KKP-11	0,477	0,279	0,000	Valid
	KKP-12	0,333	0,279	0,018	Valid
	KKP-13	0,585	0,279	0,010	Valid
	KKP-14	0,667	0,279	0,000	Valid
	KKP-15	0,678	0,279	0,000	Valid
	KKP-16	0,336	0,279	0,017	Valid
	KKP-17	0,402	0,279	0,004	Valid
	KKP-18	0,395	0,279	0,005	Valid
	KKP-19	0,279	0,279	0,050	Valid
	KKP-20	0,304	0,279	0,032	Valid
	KKP-21	0,477	0,279	0,000	Valid
KKP-22	0,333	0,279	0,018	Valid	
KKP-23	0,585	0,279	0,000	Valid	
KKP-24	0,667	0,279	0,000	Valid	
KKP-25	0,678	0,279	0,000	Valid	
KKP-26	0,678	0,279	0,000	Valid	
KKP-27	0,312	0,279	0,027	Valid	

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa 99,9% indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *Budgetary Slack*, komitmen organisasi, kompensasi, *human capital*, dan *governance* terhadap kinerja keuangan Polri yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai taraf signifikan yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini berarti bahwa semua indikator dan pernyataan pada setiap

variabel dalam penelitian ini dikatakan valid, sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data dan dapat dianalisis selanjutnya.

4.4. Uji Reliabilitas

Widiyanto (2013:59) uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang sudah valid. Uji reliabilitas kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan analisis konsistensi butir-butir yang ada. Perhitungan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, instrumen dapat dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari r-tabel ($r\text{-tabel} = 0,279$). Uji reliabilitas dimulai dengan uji validitas terlebih dahulu, jika sebuah butir item tidak valid, maka secara otomatis tidak dapat dilakukan uji reliabilitas, sedangkan jika butir item valid, maka secara bersama dilakukan pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4.
Tabel Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	r-tabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Budgetary Slack (X1)	0,279	0,782	Reliabel
Komitmen Organisasi (X2)	0,279	0,559	Reliabel
Kompensasi (X3)	0,279	0,366	Reliabel
Human Capital (X4)	0,279	0,782	Reliabel
Governance (X5)	0,279	0,713	Reliabel
Kinerja Keuangan Biro Fasilitas (Y) Dan Konstruksi Logistik Mabes Polri	0,279	0,870	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

4.5. Uji Normalitas

Sugiyono (2012:24) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji normalitas residual dengan metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual dengan bantuan SPSS 25. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Tabel dan Gambar 4.5 menyajikan hasil pengujian normalitas (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Tabel Pengujian Normalitas (Y)

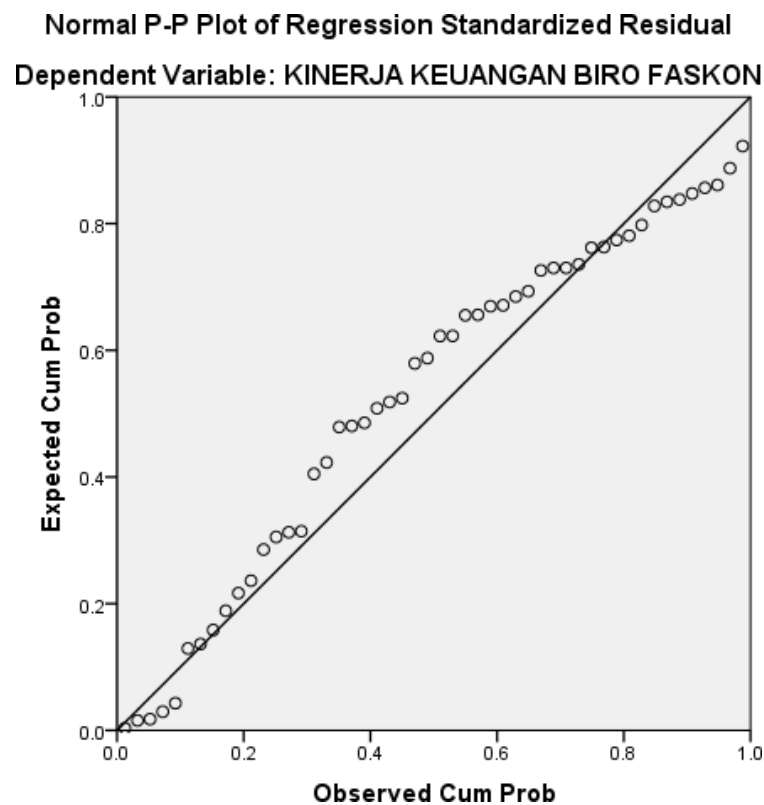
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.23622921
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.089
	Negative	-.138
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.019 ^c

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai uji signifikansi $0,138 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Gambar 4.5.
Hasil Pengujian Normalitas (Y)



Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

4.6. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel residual tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui nilai uji signifikansi variabel budgetary slack, komitmen organisasi, kompensasi, human capital, dan governance sebesar $0,710 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Gambar 4.6.
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (Y)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.554	4	17.638	.536	.710 ^b
	Residual	1481.429	45	32.921		
	Total	1551.983	49			

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

4.7. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016:138) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/\text{tolerance}$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. Tabel 4.6 menyajikan hasil pengujian multikolinearitas variabel independent sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Tabel Pengujian Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	47.214	26.179		1.804	.078		
	KOMITMEN ORGANISASI	.178	.668	.040	.267	.791	.765	1.307
	KOMPENSASI	-.419	.728	-.085	-.576	.568	.775	1.290
	HUMAN CAPITAL	1.994	.762	.400	2.617	.012	.721	1.387
	GOVERNANCE	.522	.546	.147	.955	.345	.714	1.401

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui nilai toleransi variabel komitmen organisasi $0,765 > 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas, dan nilai VIF nilai uji signifikansi variabel komitmen organisasi $1,307 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas. nilai toleransi variabel kompensasi $0,775 > 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas, dan nilai VIF nilai uji signifikansi variabel kompensasi $1,290 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas. nilai toleransi variabel human capital $0,721 > 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas, dan nilai VIF nilai uji signifikansi variabel kompensasi $1,387 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas. nilai toleransi variabel governance $0,714 > 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas, dan nilai VIF nilai uji

signifikansi variabel kompensasi $1,401 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas.

4.8. Uji T

Puspasari (2015) menyatakan bahwa uji-t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial/individu dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Polri, sedangkan variabel independen adalah *Budgetary Slack*, Komitmen Organisasi, Kompensasi, *Human Capital* dan *Governance*. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut, Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5% dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sebaliknya H_a ditolak, dan Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5%, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, sebaliknya H_a diterima. Tabel 4.7 merupakan hasil pengujian t tabel.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.214	26.179		1.804	.078
	KOMITMEN ORGANISASI	.178	.668	.040	.267	.791
	KOMPENSASI	-.419	.728	-.085	-.576	.568
	HUMAN CAPITAL	1.994	.762	.400	2.617	.012
	GOVERNANCE	.522	.546	.147	.955	.345

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics Tolerance
1	BUDGETARY SLACK	.b000

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Hasil Uji Statistik diatas dapat disimpulkan beberapa hipotesis yang ada

diantaranya:

1. H1: *Budgetary Slack* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. *Budgetary Slack* (X1); $0,000 < 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh *budgetary slack* (X1) terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y). Berdasarkan penjelasan di atas berarti hipotesis pertama ditolak.
2. H2: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Komitmen organisasi (X2); $0,791 > 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y). Berdasarkan penjelasan di atas berarti hipotesis kedua ditolak.
3. H3: Kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Kompensasi (X3); $0,568 > 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat pengaruh kompensasi (X3) terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y). Berdasarkan penjelasan di atas berarti hipotesis ketiga ditolak.
4. H4: *Human Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. *Human Capital* (X4); $0,012 < 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh *human capital* (X4) terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y). Berdasarkan penjelasan di atas berarti hipotesis keempat

diterima.

5. H5: *Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. *Governance* (X5); $0,345 > 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat pengaruh *governance* (X5) terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y). Berdasarkan penjelasan di atas berarti hipotesis kelima ditolak.

4.9. Uji F

Sugiyono (2014:257) uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *budgetary slack*, *komitmen organisasi*, *kompensasi*, *human capital* dan *governance* terhadap kinerja keuangan Polri secara simultan dan parsial. F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = k (n-k-1) dengan kriteria sebagai berikut, ditolak jika $>$ atau nilai sig $< \alpha$ dan diterima jika $<$ atau nilai sig $> \alpha$. Jika terjadi penerimaan maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel terikat Adapun yang menjadi hipotesis nol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh signifikan dan $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat

signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=0$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-variabel yang Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis diteliti. Tabel 4.8 merupakan hasil pengujian F tabel.

Tabel 4.9.

**Tabel Pengujian F Tabel
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1330.331	4	332.583	3.580	.013 ^b
	Residual	4180.089	45	92.891		
	Total	5510.420	49			

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji F jika diketahui nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3, X4, dan X5 terdapat pengaruh secara simultan terhadap Y. Hasil pengujian F tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai F hitung $< F$ tabel; $0,013 < 0,05$ dan $3,580 > 2,40$ maka dapat disimpulkan bahwa *Budgetary Slack* (X1), Komitmen Organisasi (X2), Kompensasi (X3), *Human Capital* (X4), dan *Governance* (X5) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y).

5.0. Koefisien Determinasi

Sugiyono (2014:258) koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya.

Tabel 4.9 merupakan hasil pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4.9
Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.491 ^a	.241	.174	9.638

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai R Square sebesar 0,241, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel *Budgetary Slack* (X1), Komitmen Organisasi (X2), Kompensasi (X3), *Human Capital* (X4), dan *Governance* (X5) secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) sebesar 24,1%.

5.1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh (hubungan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Pemilihan jenis analisis regresi linier berganda karena dalam penelitian ini, terdiri dari 5 variabel bebas: *budgetary slack* (X1), komitmen organisasi (X2), kompensasi (X3), *human capital* (X4), dan *governance* (X5) dan variabel terikat: kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y). Jika hasil analisis menunjukkan signifikan, maka garis regresi dapat diramalkan sebagai hubungan yang kuat antara nilai-nilai variabel bebas dan variabel terikatnya. Besar kecilnya pengaruh antar variabel dapat diukur dari perhitungan nilai koefisien determinasi (r^2). Sedangkan positif atau negatif hubungan antar variabel ditentukan oleh tanda (+) atau (-) dari nilai koefisien regresi.

Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Secara umum persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = A + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$ atau $Y = 47,214 + 0,000X_1 + 0,178X_2 - 0,419X_3 + 1,994X_4 + 0,522X_5$

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta adalah 47,214 artinya tidak terjadi perubahan variabel *Budgetary Slack* (X1), Komitmen Organisasi (X2), Kompensasi (X3), *Human Capital* (X4), dan *Governance* (X5) maka variabel Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) ada sebesar 47,214 satuan.
2. Nilai koefisien regresi *Budgetary Slack* (X1) adalah 0.000 artinya jika variabel *Budgetary Slack* (X1) meningkat 0% dengan asumsi variabel Komitmen Organisasi (X2), Kompensasi (X3), *Human Capital* (X4), dan *Governance* (X5), dan konstanta (a) sebesar 0 (nol) maka *Budgetary Slack* (X1) meningkat sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Budgetary Slack* (X1) berkontribusi positif bagi variabel Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) sehingga semakin tinggi *Budgetary Slack* (X1) pada Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri maka variabel Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) akan semakin meningkat.
3. Nilai koefisien regresi Komitmen Organisasi (X2) adalah 0.178 artinya jika variabel Komitmen Organisasi (X1) meningkat 1% dengan asumsi

variabel *Budgetary Slack* (X1), *Kompensasi* (X3), *Human Capital* (X4), dan *Governance* (X5), dan konstanta (a) sebesar 0 (nol) maka *Komitmen Organisasi* (X2) meningkat sebesar 0,178. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Komitmen Organisasi* (X2) berkontribusi positif bagi variabel *Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri* (Y) sehingga semakin tinggi *Komitmen Organisasi* (X2) pada *Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri* maka variabel *Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri* (Y) akan semakin meningkat.

4. Nilai koefisien regresi *Kompensasi* (X3) adalah -0,419 artinya jika variabel *Kompensasi* (X3) meningkat 1% dengan asumsi variabel *Budgetary Slack* (X1), *Komitmen Organisasi* (X2), *Human Capital* (X4), dan *Governance* (X5), dan konstanta (a) sebesar 0 (nol) maka *Kompensasi* (X3) menurun sebesar 0,419. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Kompensasi* (X3) berkontribusi negatif bagi variabel *Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri* (Y) sehingga semakin tinggi *Kompensasi* (X3) pada *Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri* maka variabel *Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri* (Y) akan semakin menurun.
5. Nilai koefisien regresi *Human Capital* (X4) adalah 1,994 artinya jika variabel *Human Capital* (X4) meningkat 1% dengan asumsi variabel *Budgetary Slack* (X1), *Komitmen Organisasi* (X2), *Kompensasi* (X3), dan *Governance* (X5), dan konstanta (a) sebesar 0 (nol) maka *Human Capital* (X4) meningkat sebesar 1,994. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel

Human Capital (X4) berkontribusi positif bagi variabel Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) sehingga semakin tinggi *Human Capital* (X4) pada Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri maka variabel Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) akan semakin meningkat.

6. Nilai koefisien regresi *Governance* (X5) adalah 0.522 artinya jika variabel *Governance* (X5) meningkat 1% dengan asumsi variabel *Budgetary Slack* (X1), Komitmen Organisasi (X2), Kompensasi (X3), dan *Human Capital* (X4), dan konstanta (a) sebesar 0 (nol) maka *Governance* (X5) meningkat sebesar 0.522. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Governance* (X5) berkontribusi positif bagi variabel Kinerja Keuangan Polri (Y) sehingga semakin tinggi *Governance* (X5) pada Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri maka variabel Kinerja Keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri (Y) akan semakin meningkat.

5.2. Pembahasan

1. Hipotesis 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Budgetary Slack* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 1 ditolak yang berarti variabel *Budgetary Slack* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Hasil penelitian ini didukung oleh Yilmaz et al. (2015) menyimpulkan bahwa *budgetary slack* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi publik disebabkan oleh persepsi politik organisasi. Sumampouw (2018) menyimpulkan bahwa

budgetary slack berpengaruh positif apabila nilai *human capital* rendah, dimana *human capital* merupakan tolak ukur kinerja keuangan pada suatu organisasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kondisi empiris dapat diperoleh kesimpulan bahwa *budgetary slack* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. *Budgetary slack* dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri disebabkan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019 yang mengatur tentang kebijakan yang harus diambil oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada akhir tahun anggaran sehingga proyek pembangunan fasilitas dan konstruksi dapat selesai walaupun sudah habis masa kontrak dan penyedia barang/jasa dapat bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek pembangunan fasilitas dan konstruksi pada tahun anggaran tersebut dengan pembuatan jaminan penyelesaian pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa.

2. Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 2 ditolak yang berarti variabel Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Kesimpulan ini didukung oleh Nugraha et al. (2015) menyatakan bahwa kompetensi pegawai (*human capital*) dan

komitmen organisasi secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 25.9% dan sisanya sebesar 74.1% dipengaruhi oleh faktor lain. Angka ini menunjukkan kecilnya kontribusi dua variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikatnya. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kondisi empiris dapat diperoleh kesimpulan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Komitmen organisasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri disebabkan kurangnya perhatian Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) Logistik Mabes Polri dalam pemberian promosi jabatan ataupun pemberian reward dalam bentuk kenaikan pangkat lebih tinggi satu tingkat (lebih cepat maksimal 2 tahun) kepada anggota Polri dan PNS Polri pada Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri yang berkompeten dan memiliki loyalitas terhadap instansi, dimana promosi jabatan yang diberikan dapat menstimulasi anggota Polri dan PNS Polri pada Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri dalam berkomitmen terhadap organisasi.

3. Hipotesis 3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 3 ditolak yang berarti variabel Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Hasil ini didukung oleh Berber et al. (2017)

menyatakan bahwa kompensasi tidaklah mempengaruhi kinerja keuangan suatu Negara dalam kawasan Negara Eropa Timur. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kondisi empiris dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Kompensasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri disebabkan adanya ketimpangan jumlah tunjangan kinerja dengan besarnya tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab moral terhadap pekerjaan antara pejabat eselon IV dan III dimana tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab moral terhadap pekerjaan lebih besar dan banyak pejabat eselon IV dan pekerjaan yang dilakukan pejabat eselon IV merupakan pekerjaan eselon III pada umumnya.

4. Hipotesis 4 dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Human Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Polri. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka hipotesis 4 diterima yang berarti variabel *Human Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Kesimpulan ini didukung oleh Rahayuni et al. (2018) menyimpulkan bahwa *Human Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) dan media lain seperti *website*, atau frekuensi pertemuan pelatihan dan tingkat pendidikan pimpinan. Athumani et al. (2018) menyimpulkan bahwa pelatihan, masalah etika dan penggunaan telekomunikasi informasi komunikasi memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi proses tender. Namun, menghadiri

pelatihan dengan frekuensi yang lebih jarang dapat mempengaruhi proses tender karena pelatihan sangat penting karena memastikan bahwa staf tidak dibiarkan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan kinerja keuangan yang akuntabel dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kondisi empiris dapat diperoleh kesimpulan bahwa *Human Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri.

5. Hipotesis 5 dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka hipotesis 5 ditolak yang berarti variabel *Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri. Hasil penelitian ini didukung oleh Wardani (2017), Safuro et.al. (2019), Prasetyo & Mais (2021) menyimpulkan bahwa *Good Governance* yang diukur menggunakan ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris serta proporsi ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kondisi empiris dapat diperoleh kesimpulan bahwa *Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Biro Fasilitas dan Konstruksi Logistik Mabes Polri disebabkan oleh masih adanya intervensi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran pada akhir tahun anggaran.